STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Maya Maulidha
NPP. 33.0783
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: mayamaulidha7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hendrawati Hamid, M.Si.
Email: hendrawati@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research is motivated by the issue of stunting, which remains a national priority. Banjarbaru City experienced an increase in stunting prevalence by 1.1%, rising from 12.4% in 2023 to 13.5% in 2024 based on Indonesian Nutritional Status Survey (SSGI) data. Key identified problems include suboptimal exclusive breastfeeding (with 43.35% of infants not receiving it), low compliance among adolescent girls in consuming Iron Supplement Tablets (TTD), and limited public understanding of nutrition and proper parenting.* ***Purpose:*** *The objective of this research is to identify and analyze the development communication strategies implemented in handling stunting in Banjarbaru City.* ***Method:*** *The research method used is qualitative descriptive, employing SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The strategy evaluation is based on four dimensions of the Academy for Educational Development (AED) theory: media-based, instructional design, participatory, and marketing strategies.* ***Result:*** *Based on the SWOT analysis, the position of the Banjarbaru City Government is in Quadrant I (Aggressive/Expansion Strategy) with an IFAS score of 2.8 and an EFAS score of 3.0. The resulting recommended strategies (S-O) include optimizing regional policies (Mayor Regulation No. 1 of 2023), strengthening cross-sector synergy between the Health Office and DP3APMP2KB, and innovating digital media to accelerate sustainable stunting reduction.* ***Conclusion:*** *Based on the SWOT analysis, the position of the Banjarbaru City Government is in Quadrant I (Aggressive/Expansion Strategy) with an IFAS score of 2.8 and an EFAS score of 3.0. The resulting recommended strategies (S-O) include optimizing regional policies (Mayor Regulation No. 1 of 2023), strengthening cross-sector synergy between the Health Office and DP3APMP2KB, and innovating digital media to accelerate sustainable stunting reduction.*

Keywords: *Development Communication Strategy, Stunting, Banjarbaru City, SWOT analysis*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan stunting yang menjadi isu prioritas nasional, di mana Kota Banjarbaru mengalami peningkatan prevalensi stunting sebesar 1,1% dari tahun 2023 (12,4%) menjadi 13,5% pada tahun 2024 berdasarkan data SSGI. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya capaian ASI Eksklusif, kurangnya kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pola asuh dan gizi seimbang. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Penilaian strategi dilakukan menggunakan empat dimensi dari teori Academy for Educational Development (AED), yaitu strategi berdasarkan media, desain instruksional, partisipatori, dan pemasaran. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan analisis SWOT, posisi Pemerintah Kota Banjarbaru berada pada Kuadran I (Strategi Agresif/Ekspansi) dengan skor IFAS 2,8 dan EFAS 3,0. Strategi rekomendasi yang dihasilkan (S-O) meliputi optimalisasi kebijakan daerah (Perwali No. 1 Tahun 2023), penguatan sinergi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan DP3APMP2KB, serta inovasi media digital guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan. **Kesimpulan:** Berdasarkan analisis SWOT, posisi Pemerintah Kota Banjarbaru berada pada Kuadran I (Strategi Agresif/Ekspansi) dengan skor IFAS 2,8 dan EFAS 3,0. Strategi rekomendasi yang dihasilkan (S-O) meliputi optimalisasi kebijakan daerah (Perwali No. 1 Tahun 2023), penguatan sinergi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan DP3APMP2KB, serta inovasi media digital guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi Komunikasi Pembangunan, Stunting, Kota Banjarbaru, Analisis SWOT.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu isu kesehatan global yang menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting adalah kondisi hambatan pertumbuhan tinggi badan akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak memiliki postur lebih pendek dibandingkan usianya. Prevalensi stunting balita di dunia mencapai 21,9%, dengan kasus tertinggi berada di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia (UNICEF, 2023). Di Indonesia, prevalensi stunting mencapai 19,8% pada tahun 2024, menurun dari 24,4% pada tahun 2021, namun masih perlu diturunkan hingga target 14,2% pada tahun 2029 (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Stunting dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung meliputi kurangnya pemenuhan gizi anak, seperti pemberian ASI eksklusif yang tidak diimbangi MP-ASI yang sesuai. Faktor tidak langsung meliputi kemiskinan, sanitasi yang buruk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan kapasitas individu dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mampu menentukan dan mengelola perubahan sosial secara mandiri (Usman, 2010). Selain itu, pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Hasan & Azis, 2018). Oleh karena itu,

penanganan stunting merupakan bagian dari upaya pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi masa depan.

Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang memuat lima pilar utama, yaitu: peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; peningkatan ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan sistem data, informasi, riset, dan inovasi (Perpres No. 72 Tahun 2021). Selain itu, pemerintah melaksanakan delapan aksi konvergensi, antara lain analisis situasi, rembuk stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan.

Di Kalimantan Selatan, prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 22,9%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 19,8% dan masih berada di atas standar WHO yaitu <20% (SSGI, 2024). Sementara itu, Kota Banjarbaru mengalami peningkatan prevalensi stunting dari 12,4% pada tahun 2023 menjadi 13,5% pada tahun 2024 atau naik sebesar 1,1% (SSGI, 2024). Pada tahun 2024 terdapat 6.575 balita berisiko stunting di Kota Banjarbaru (Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2024). Permasalahan yang masih dihadapi Kota Banjarbaru antara lain rendahnya cakupan ASI eksklusif, yaitu hanya 58% pada tahun 2024 sehingga masih terdapat 43,35% bayi yang belum memperoleh ASI eksklusif. Selain itu, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri masih rendah dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gizi balita dan ibu hamil, pola asuh, sanitasi, pola makan, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan anak (Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2024).

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, dan melaksanakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Raharjo, 2021). Pemberdayaan juga bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengakses sumber daya, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri (Maryani, 2018). Oleh karena itu, upaya penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Penanganan stunting memerlukan strategi komunikasi pembangunan yang efektif. Komunikasi pembangunan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memobilisasi pemahaman, mengubah perilaku, dan membangun kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Sesuai pilar kedua Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu memperkuat komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat agar prevalensi stunting dapat ditekan (Perpres No. 72 Tahun 2021). Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan akan mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, memiliki akses terhadap informasi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan (Sumodiningrat, 2009). Dengan demikian, komunikasi pembangunan harus diarahkan tidak hanya untuk menyampaikan pesan kesehatan, tetapi juga untuk membangun kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam mencegah stunting.

Penelitian ini menggunakan teori Academy for Educational Development (AED) yang memandang komunikasi pembangunan sebagai proses perubahan sosial melalui penyampaian informasi, edukasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Academy for Educational Development, 1985). Teori ini

relevan karena keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada efektivitas komunikasi mengenai pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi, dan kesadaran kesehatan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berdasarkan penelitian, penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya risiko stunting di Kota Banjarbaru yang ditunjukkan oleh meningkatnya prevalensi stunting dari 12,4% pada tahun 2023 menjadi 13,5% pada tahun 2024. Permasalahan tersebut diperkuat dengan masih rendahnya capaian pemberian ASI eksklusif, rendahnya kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang, pola asuh anak, sanitasi, dan kesehatan ibu serta balita. Selain itu, pola komunikasi yang selama ini dilakukan pemerintah masih cenderung bersifat top-down melalui sosialisasi, spanduk, banner, dan seminar yang belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan informasi masyarakat secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi kesehatan, tetapi juga pada efektivitas strategi komunikasi pembangunan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas komunikasi pembangunan dan strategi komunikasi dalam penanganan stunting, seperti penelitian di Kabupaten Batubara, Kota Parepare, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bojonegoro, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada komunikasi berbasis kearifan lokal, komunikasi kesehatan, peran kader posyandu, atau strategi pembangunan secara umum. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru dengan menggunakan perspektif Academy for Educational Development (AED) yang meliputi strategi media, desain instruksional, partisipatori, dan pemasaran, serta dianalisis menggunakan pendekatan SWOT untuk merumuskan strategi yang paling tepat. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi strategi komunikasi pembangunan guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat prevalensi stunting di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dari 12,4% pada tahun 2023 menjadi 13,5% pada tahun 2024, sementara masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya pemberian ASI eksklusif, rendahnya kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gizi, pola asuh, sanitasi, dan kesehatan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi kesehatan, tetapi juga pada efektivitas strategi komunikasi pembangunan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penanganan stunting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penguatan program yang lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan data serta informasi yang komprehensif mengenai efektivitas strategi komunikasi yang telah dijalankan, sehingga upaya percepatan penurunan stunting berisiko kurang optimal, tidak mampu menjangkau kelompok sasaran secara efektif, serta berpotensi

menghambat pencapaian target penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Banjarbaru.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan dan penanganan stunting. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di berbagai daerah. Selain itu, keberhasilan program pembangunan dan penanganan stunting juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi para pemangku kepentingan, karena keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah, dan berbagai aktor terkait dapat meningkatkan efektivitas implementasi program serta keberlanjutan hasil pembangunan (Reed, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wulan Ramadhan (2020) mengkaji strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori Academy for Educational Development (AED). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan berbagai inovasi pembangunan yang dikomunikasikan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana kesehatan yang lebih baik, pemberian beasiswa pendidikan, serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan menekankan penggunaan saluran komunikasi, karakteristik sistem sosial, jangka waktu, dan inovasi sebagai faktor penting dalam penyampaian pesan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan konsep coproduction yang dikemukakan oleh Ostrom (1996), bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program.

Selanjutnya, Hasan Sazali (2022) meneliti komunikasi pembangunan berbasis kearifan lokal dalam penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research) dan teori komunikasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan komunikasi pembangunan dilakukan melalui pendekatan budaya komunikasi kerja, budaya komunikasi layanan, dan budaya komunikasi transformatif yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Pendekatan berbasis kearifan lokal tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan stunting. Temuan tersebut relevan dengan penelitian Astuti et al. (2025) yang menegaskan bahwa penanganan stunting memerlukan intervensi kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan memperhatikan interaksi faktor lingkungan, sosial, serta kesehatan secara terpadu.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Insyirah Salsabila Alif (2023) mengenai strategi komunikasi kesehatan dalam penanganan stunting di Kelurahan Watang Bacukiki Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teori strategi komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan komunikasi kesehatan, seperti ketidaksesuaian waktu antara komunikator dan sasaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi stunting, serta belum mutakhirnya data administratif warga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah kelurahan mengembangkan berbagai program inovatif, seperti Mobile Peduli Stunting, Si Jaber, pemberian makanan tambahan, dan program DAHSYAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Pengembangan program inovatif ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi

kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Roberta et al. (2025) bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan akurasi analisis data dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu sistem.

Penelitian lain dilakukan oleh Tukma Harahap (2025) yang mengkaji strategi komunikasi kader posyandu dalam penanganan stunting di Desa Tengklik Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teori komunikasi Lasswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu menerapkan strategi komunikasi interpersonal melalui kunjungan rumah, komunikasi tatap muka, pemanfaatan aplikasi WhatsApp, serta rapat koordinasi rutin. Strategi tersebut mampu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi dan geografis sehingga mendukung keberhasilan program penurunan stunting di wilayah penelitian. Keberhasilan upaya penanganan stunting melalui komunikasi yang efektif juga memiliki dampak ekonomi jangka panjang, karena peningkatan status gizi anak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di masa depan (Aguilera-Vasquez & Daher, 2019).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada strategi komunikasi, komunikasi pembangunan, maupun komunikasi kesehatan dalam upaya penanganan stunting. Berbagai penelitian juga menegaskan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan inovasi teknologi, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan dan percepatan penurunan stunting. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan teori Academy for Educational Development (AED) serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang paling efektif dalam menurunkan prevalensi stunting. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian komunikasi pembangunan, khususnya pada penanganan stunting di tingkat pemerintah daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu, baik dari aspek teoritis, metodologis, kebijakan, maupun karakteristik objek penelitian. Penelitian Rizky Wulan Ramadhan (2020) mengkaji strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menggunakan teori Academy for Educational Development (AED). Fokus penelitian tersebut berada pada komunikasi pembangunan secara umum dalam mendukung program pembangunan daerah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru dengan menitikberatkan pada upaya perubahan perilaku masyarakat melalui empat dimensi AED, yaitu strategi berbasis media, desain instruksional, partisipatori, dan pemasaran. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan strategi yang dijalankan, tetapi juga merumuskan strategi pengembangan melalui analisis SWOT yang tidak digunakan dalam penelitian Ramadhan.

Perbedaan juga terlihat dengan penelitian Hasan Sazali (2022) yang membahas komunikasi pembangunan berbasis kearifan lokal dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Batubara. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pendekatan budaya lokal sebagai sarana komunikasi pembangunan. Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus pada strategi komunikasi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan media

komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda karena tidak hanya melihat aspek budaya lokal, tetapi juga menganalisis efektivitas komunikasi pembangunan berdasarkan dimensi AED serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan program penanganan stunting.

Selanjutnya, penelitian Insyirah Salsabila Alif (2023) berfokus pada strategi komunikasi kesehatan dalam penanganan stunting di Kelurahan Watang Bacukiki Kota Parepare. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan komunikasi kesehatan yang menekankan proses penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif komunikasi pembangunan yang memiliki cakupan lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi kesehatan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu, objek penelitian Alif berada pada tingkat kelurahan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat pemerintah kota sehingga menghasilkan ruang lingkup analisis kebijakan yang lebih luas.

Perbedaan lainnya terdapat pada penelitian Tukma Harahap (2025) yang mengkaji strategi komunikasi kader posyandu dalam penanganan stunting di Desa Tengklik Kabupaten Gunungkidul menggunakan teori komunikasi Lasswell. Fokus penelitian tersebut berada pada peran kader posyandu sebagai komunikator utama dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian ini menganalisis strategi komunikasi pembangunan yang melibatkan berbagai aktor, seperti Dinas Kesehatan, DP3APMP2KB, kader posyandu, kader PKK, dan masyarakat melalui pendekatan komunikasi pembangunan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi strategi komunikasi pembangunan penanganan stunting. Dari aspek kebijakan, penelitian ini juga memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan tersebut dianalisis dalam konteks komunikasi pembangunan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah membangun sinergi lintas sektor dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Fokus kebijakan ini belum ditemukan secara spesifik dalam penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang hingga saat ini belum banyak diteliti. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan teori Academy for Educational Development (AED) yang menganalisis strategi komunikasi melalui empat dimensi, yaitu strategi berbasis media, desain instruksional, partisipatori, dan pemasaran, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori Rogers, Cangara, Lasswell, maupun pendekatan komunikasi berbasis kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan guna merumuskan strategi penanganan stunting yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan kajian komunikasi pembangunan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan strategis yang berbasis kondisi empiris Kota Banjarbaru.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan strategi komunikasi pembangunan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru melalui pengalaman, pandangan, dan pemaknaan para aktor yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat (Sugiyono, 2019). Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan percepatan penurunan stunting, Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Nasional, dokumen Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan dokumen Rembuk Stunting Kota Banjarbaru Tahun 2024. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling karena informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program penanganan stunting (Bungin, 2006). Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan utama dalam perumusan kebijakan dan koordinasi program percepatan penurunan stunting, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga DP3APMP2KB, serta masyarakat yang berada di wilayah prioritas penanganan stunting. Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang utuh dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana program, dan penerima manfaat program.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat diverifikasi kebenarannya (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2019). Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dalam strategi komunikasi pembangunan penanganan stunting. Analisis SWOT dilakukan melalui penyusunan matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) untuk menghasilkan rekomendasi strategi yang tepat bagi Pemerintah Kota Banjarbaru (Rangkuti, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru. Pelaksanaan penelitian mengacu pada Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2025/2026, dimulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, hingga penyusunan laporan penelitian yang berlangsung mulai dari 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada subbab ini penulis menjelaskan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru.

3.1 Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penanganan Stunting di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Menurut Rangkuti (2016:3), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam menghadapi berbagai perubahan, diperlukan analisis dan perencanaan strategis. Untuk menjalankan strategi tersebut diperlukan komunikasi yang baik melalui komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara berkembang yang berfokus pada perubahan sosial yang terencana (Harun & Ardianto, 2011:2). Komunikasi berperan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mencegah dan menangani stunting, penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi pembangunan menurut Academy for Educational Development (AED) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu strategi berdasarkan media, strategi desain instruksional, strategi partisipatori, dan strategi pemasaran.

3.1.1 Strategi Berdasarkan Media

Strategi komunikasi pembangunan berbasis media diwujudkan melalui pemanfaatan media sebagai sarana penyampaian informasi. Hal ini sesuai dengan Pilar Kedua Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui aksi kampanye. Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan indikator media sebagai pemberi informasi dengan memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi untuk mengenalkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat. Dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, DP3APMP2KB Kota Banjarbaru berperan sebagai Koordinator Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.

DP3APMP2KB menggunakan berbagai media seperti radio, leaflet, poster, baliho, siaran langsung televisi lokal, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Sosialisasi dilakukan melalui Forum Genre Kota Banjarbaru ke sekolah dan perguruan tinggi, Poktan BKB, serta kader posyandu di setiap kelurahan. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru juga memanfaatkan media cetak, elektronik, dan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai pengertian, penyebab, dampak stunting, pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta perilaku hidup sehat. Pelaksanaannya didukung oleh puskesmas, kader posyandu, dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, pemanfaatan media cetak, elektronik, dan media sosial menjadi strategi yang efektif untuk mendukung kampanye percepatan penurunan dan penanganan stunting di Kota Banjarbaru karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

3.1.2 Strategi Desain Instruksional

Strategi desain instruksional berfokus pada perencanaan yang sistematis, meliputi tujuan, indikator keberhasilan, partisipan, sumber daya, pendekatan, dan waktu pelaksanaan (Zakiah & Umar, 2005; Maharani, 2013). Dalam penelitian ini, strategi desain instruksional yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku sesuai Pilar Kedua Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Berdasarkan teori AED, fokus utamanya adalah menemukan pendekatan yang tepat agar pesan dapat dipahami dan diterapkan oleh kelompok sasaran sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Strategi ini diwujudkan melalui indikator Sistem Pembelajaran bagi Masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan DP3APMP2KB Kota Banjarbaru. Dinas Kesehatan menyusun

strategi komunikasi perubahan perilaku yang memuat langkah-langkah penanganan stunting serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. DP3APMP2KB menekankan pentingnya proses edukasi yang terencana dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat dilibatkan secara aktif melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dan praktik langsung di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, strategi desain instruksional dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada perancangan proses pembelajaran yang mudah dipahami sehingga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.

3.1.3 Strategi Partisipatori

Komunikasi partisipatif memiliki peranan penting dalam pembangunan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap prosesnya. Keterlibatan tersebut ditunjukkan melalui kemampuan masyarakat dalam memahami permasalahan, mencari solusi, serta mengambil keputusan secara bijaksana (Kustiawan & Lim, 2023). Strategi partisipatori sejalan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yaitu memberikan sosialisasi di tingkat kecamatan terkait program pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Strategi ini dilaksanakan oleh DP3APMP2KB Kota Banjarbaru untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dengan indikator keterlibatan masyarakat.

Pelaksanaannya dilakukan melalui Poktan Bina Keluarga, kader PKK, dan kader Posyandu yang melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga, khususnya ibu hamil dan ibu balita, agar menerapkan PHBS dan memperhatikan asupan gizi anak. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam diskusi, berbagi pengalaman, serta mengikuti kegiatan posyandu dan program intervensi lainnya. Kader Posyandu turut berperan melalui pemeriksaan tumbuh kembang anak, pelayanan kesehatan, serta sosialisasi interaktif kepada ibu yang memiliki balita. Kegiatan yang dilakukan antara lain edukasi cuci tangan yang benar, pengolahan makanan bergizi untuk balita, dan simulasi pemberian MP-ASI yang sesuai. Dengan demikian, keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat melalui partisipasi dalam kegiatan posyandu, PKK, sosialisasi, dan berbagai program penanganan stunting.

3.1.4 Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran dalam penanganan stunting mengarah pada bagaimana program kesehatan dapat disampaikan agar menarik perhatian, dipahami, dan diikuti oleh masyarakat (Harun & Ardianto, 2011). Pemasaran dalam konteks ini bukan menjual produk, melainkan mempengaruhi perilaku masyarakat agar menerapkan PHBS. Strategi ini sesuai dengan Pilar Kedua Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui aksi kampanye. Indikator yang digunakan adalah upaya menarik minat masyarakat.

Kelompok sasaran program pencegahan stunting telah ditetapkan secara jelas. Kepala wilayah, kader posyandu, dan puskesmas melaksanakan sosialisasi secara terintegrasi. Puskesmas juga melakukan kegiatan Aksi Bergizi di sekolah melalui kampanye konsumsi tablet tambah darah, sarapan bersama, dan pemberian motivasi kepada siswa. Selain itu, tablet tambah darah didistribusikan secara rutin kepada remaja putri di sekolah. Kader posyandu menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Sosialisasi dilakukan saat kegiatan posyandu bersamaan dengan penimbangan dan pemeriksaan anak. Materi yang disampaikan meliputi

pengertian stunting, penyebab, serta langkah pencegahan seperti gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola asuh yang baik.

Upaya tersebut terlihat melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi, kegiatan sosialisasi yang menarik seperti Aksi Bergizi, serta keterlibatan kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam menyampaikan pesan secara langsung. Pendekatan yang digunakan tidak hanya informatif tetapi juga persuasif melalui kampanye konsumsi tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang, dan pemberian motivasi kepada ibu hamil serta remaja putri. Melalui gerakan "Ayo Ke Posyandu", masyarakat khususnya ibu hamil, balita, dan calon pengantin menjadi lebih aktif mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Kampanye ini membantu meningkatkan deteksi dini masalah gizi serta memperluas edukasi kesehatan keluarga.

3.1.5 Analisis Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi atau pelaksana program, yaitu pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru. Analisis faktor internal mencakup kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi pembangunan. Analisis ini dipadukan dengan teori SWOT menurut Rangkuti (2014).

1. Kekuatan (Strength)

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, faktor kekuatan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penanganan stunting meliputi:

a. Terdapat Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

   Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 menjadi landasan hukum dan pedoman pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan stunting sebagai isu prioritas pembangunan. Peraturan tersebut memperjelas pembagian peran setiap perangkat daerah, memperkuat koordinasi antar OPD, serta mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Selain itu, regulasi ini memperkuat legitimasi strategi komunikasi pembangunan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat karena memiliki dasar hukum yang jelas.

b. Dukungan Kebijakan Anggaran

   Dukungan kebijakan anggaran merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mengarahkan prioritas pembangunan daerah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan anggaran didasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 yang memberikan legitimasi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemerintah Kota Banjarbaru juga menjadikan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana kesehatan, serta program intervensi gizi bagi ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting.

c. Program Terkait Penanganan Stunting di Kota Banjarbaru

   Program penanganan stunting di Kota Banjarbaru dilaksanakan secara terintegrasi melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan dan DP3APMP2KB. Dinas Kesehatan menjalankan intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan (PMT), pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta edukasi mengenai gizi seimbang dan pola asuh yang baik. Program tersebut dilaksanakan melalui koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama berbagai OPD agar intervensi yang dilakukan saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

2. Kelemahan (Weakness)

Program penanganan stunting di Kota Banjarbaru masih menghadapi beberapa kelemahan, yaitu:

a. Masih terdapat bayi usia kurang dari 6 bulan belum mendapatkan ASI Eksklusif secara maksimal

   Belum optimalnya pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman ibu, persepsi yang kurang tepat mengenai pemberian makanan tambahan, keterbatasan waktu bagi ibu bekerja, serta kurangnya dukungan keluarga. Kondisi ini menjadi kelemahan karena ASI eksklusif merupakan salah satu upaya penting dalam pencegahan stunting sejak dini. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan edukasi dan pendampingan kepada keluarga agar praktik ASI eksklusif dapat meningkat.

b. Masih rendahnya remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

   Rendahnya konsumsi TTD pada remaja putri dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya TTD, rendahnya kesadaran untuk mengonsumsi secara rutin, efek samping ringan seperti mual, serta belum optimalnya dukungan dari sekolah dan keluarga. Kondisi ini menjadi kelemahan karena anemia pada remaja putri dapat berlanjut hingga masa kehamilan dan meningkatkan risiko melahirkan bayi yang berpotensi mengalami stunting. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penguatan peran sekolah dan keluarga, serta inovasi strategi komunikasi untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD secara berkelanjutan.

3.1.6 Analisis Faktor Eksternal

Menurut Freddy Rangkuti, faktor eksternal dalam analisis SWOT merupakan faktor yang berasal dari luar pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi keberhasilan program penanganan stunting. Faktor eksternal terdiri atas peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

1. Peluang (Opportunities)

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, peluang dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru meliputi:

a. Kerjasama Lintas Sektor

   Kerja sama lintas sektor merupakan pendekatan strategis dalam penanganan stunting karena stunting merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dukungan kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan stunting sebagai program prioritas nasional memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam merancang program, memperoleh dukungan anggaran, dan pendampingan teknis. Hal ini memudahkan integrasi program penanganan stunting ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Terbentuknya TPPS

   Terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pendekatan terpadu, terkoordinasi, dan lintas sektor. TPPS dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan dari berbagai sektor karena stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, sanitasi, pendidikan, dan pola asuh. Melalui TPPS, setiap OPD dapat menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi, baik dalam intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

c. Dukungan Stakeholder Terkait

   Dukungan stakeholder memiliki peran penting dalam keberhasilan program penanganan stunting. Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, DP3APMP2KB, kader posyandu, kader PKK, serta masyarakat. Kader posyandu

dan kader PKK berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lapangan melalui pemantauan tumbuh kembang balita, penyuluhan kesehatan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Dukungan berbagai stakeholder tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program penanganan stunting secara berkelanjutan.

2. Ancaman (Threats)

a. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan berpotensi menciptakan siklus kemiskinan yang berulang karena anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah di masa depan.

Tabel 1.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Kota Banjarbaru

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)
1.	2020	653.556	11.951	4,40
2.	2021	692.380	11.610	4,17
3.	2023	753.899	11.181	3,92
4.	2024	781.405	11.065	3,79

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 1. tingkat kemiskinan di Kota Banjarbaru menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Penurunan kemiskinan memiliki hubungan erat dengan penanganan stunting karena meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi, akses layanan kesehatan, sanitasi, serta pola asuh yang lebih baik. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan menjadi indikator positif yang mendukung upaya penurunan prevalensi stunting.

b. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih menjadi ancaman dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru. Meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui kader dan penyuluh, masih terdapat masyarakat yang menganggap stunting hanya sebagai kondisi anak pendek dan belum memahami dampaknya terhadap kesehatan dan kecerdasan anak. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, kesehatan ibu hamil, serta pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Perbedaan latar belakang masyarakat juga menjadi tantangan dalam penyampaian pesan. Oleh karena itu, strategi komunikasi pembangunan perlu terus diperkuat melalui penyampaian pesan yang lebih efektif, mudah dipahami, dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.7 Hasil dari Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penanganan Stunting di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), dilakukan pengukuran untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap efektivitas strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru.

Tabel 2.
Matriks IFAS

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan :			
• Terdapat Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	0,2	3	0,6
• Dukungan Kebijakan Anggaran • Program terkait penanganan stunting	0,2	4	0,8
	0,2	3	0,6
Kelemahan :			
• Masih terdapat bayi usia kurang dari 6 bulan belum mendapatkan ASI Ekslusif secara maksimal.	0,2	2	0,4
• Masih rendahnya remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	0,2	2	0,4
Jumlah	**1,00**		**2,8**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 2. diperoleh skor IFAS sebesar 2,8, yang menunjukkan bahwa faktor kekuatan lebih dominan dibandingkan kelemahan dalam mendukung strategi komunikasi pembangunan penanganan stunting di Kota Banjarbaru.

Tabel 3.
Matriks EFAS

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang :			
• Kerjasama lintas sektor	0,2	3	0,6
• Terbentuknya TPPS	0,2	4	0,8
• Dukungan *stakeholder* terkait	0,2	3	0,6
Ancaman :			
• Tingkat kemikinan	0,2	2	0,4
• Kesadaran masyarakat masih kurang	0,2	3	0,6
Jumlah	**1,00**		**3,00**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 3. diperoleh skor EFAS sebesar 3,0, yang menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki lebih besar dibandingkan ancaman dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru.

Gambar 1.
Kuadran SWOT

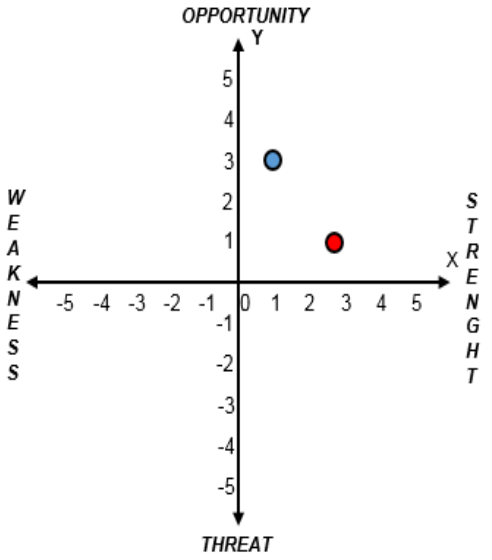

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan Gambar 1. hasil perhitungan IFAS dan EFAS menunjukkan nilai sumbu X sebesar 2,8 dan sumbu Y sebesar 3,0. Posisi tersebut berada pada Kuadran I (Strategi Agresif/S-O), yang berarti Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kekuatan internal yang besar dan peluang eksternal yang tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

Tabel 4.
Matriks SWOT

IFAS / **EFAS**	***STRENGTH* (KEKUATAN)** 1. Adanya Peraturan Walikota 2. Dukungan kebijakan anggaran **3.** Program terkait penanganan stunting
***OPPORTUNITIES* (PELUANG)** 1. Kerjasama lintas sektor 2. Terbentuknya TPPS **3.** Dukungan stakeholder terkait	**STRATEGI S-O** 1. Mengoptimalkan dukungan kebijakan daerah (Perwali/Program) untuk memperluas jangkauan komunikasi pencegahan stunting melalui berbagai media (digital, posyandu, dan penyuluhan langsung). 2. Memanfaatkan sinergi lintas sektor (Dinas Kesehatan, DP3APMP2KB, kader posyandu) untuk meningkatkan efektivitas kampanye edukasi 1000 HPK. 3. Mengembangkan inovasi media komunikasi (media sosial, video edukasi, kampanye kreatif) guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting. 4. Memperkuat peran kader dan tenaga kesehatan sebagai agen komunikasi pembangunan di tingkat masyarakat.

	5. Mengoptimalkan program nasional dan dukungan pusat sebagai peluang dalam mempercepat penurunan angka stunting.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4. strategi yang dihasilkan adalah Strategi S-O (Strength–Opportunities) dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk memaksimalkan peluang eksternal dalam percepatan penurunan stunting.

Strategi S-O yang Diusulkan :

a. Mengoptimalkan dukungan kebijakan daerah (Perwali/Program) untuk memperluas jangkauan komunikasi pencegahan stunting

   Dukungan kebijakan daerah melalui Peraturan Wali Kota dan program prioritas pemerintah menjadi landasan untuk memperluas komunikasi pencegahan stunting melalui media digital, posyandu, dan penyuluhan langsung. Kebijakan ini mendukung alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor sehingga komunikasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

b. Memanfaatkan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas kampanye edukasi 1000 HPK

   Sinergi antara Dinas Kesehatan, DP3APMP2KB, dan kader posyandu menjadi strategi penting dalam kampanye edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dinas Kesehatan menyediakan materi edukasi berbasis medis, DP3APMP2KB fokus pada ketahanan keluarga dan perencanaan kehamilan sehat, sedangkan kader posyandu menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Sinergi ini membuat kampanye berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

c. Mengembangkan inovasi media komunikasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting

   Pemanfaatan media sosial, video edukasi, dan kampanye kreatif menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Media digital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan mudah dipahami, sedangkan kampanye kreatif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam pencegahan stunting.

d. Memperkuat peran kader dan tenaga kesehatan sebagai agen komunikasi pembangunan di tingkat masyarakat

   Kader posyandu dan tenaga kesehatan merupakan ujung tombak komunikasi pembangunan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan komunikasi interpersonal, konseling gizi, dan penggunaan media edukasi. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai penyuluh kesehatan tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator perubahan perilaku masyarakat.

e. Mengoptimalkan program nasional dan dukungan pusat sebagai peluang dalam mempercepat penurunan angka stunting

   Pemerintah Kota Banjarbaru perlu memanfaatkan program nasional seperti Program Bangga Kencana, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa untuk intervensi stunting. Dukungan pemerintah pusat berupa

pendampingan teknis, materi edukasi, dan sistem monitoring dapat memperkuat efektivitas strategi komunikasi pembangunan serta mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di Kota Banjarbaru.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan melalui empat dimensi utama menurut teori Academy for Educational Development (AED), yaitu strategi berbasis media, strategi desain instruksional, strategi partisipatori, dan strategi pemasaran. Keempat strategi tersebut dijalankan secara terintegrasi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan, DP3APMP2KB, kader posyandu, kader PKK, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wulan Ramadhan (2020) mengenai strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ramadhan menemukan bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai saluran komunikasi dan inovasi pembangunan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian di Kota Banjarbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan berbagai media komunikasi seperti media sosial, leaflet, baliho, radio, televisi lokal, serta kegiatan sosialisasi langsung menjadi sarana penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan stunting kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Ramadhan berfokus pada komunikasi pembangunan untuk mendukung pembangunan daerah secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting sebagai isu kesehatan prioritas nasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komunikasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keberagaman media yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan komunikasi dengan kebijakan daerah, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hasan Sazali (2022) yang menyimpulkan bahwa komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Pada penelitian Sazali, pendekatan komunikasi dilakukan melalui kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Kabupaten Batubara. Sementara itu, penelitian di Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan lebih mengarah pada kombinasi antara komunikasi langsung dan pemanfaatan media digital. Perbedaan karakteristik wilayah menjadi faktor yang memengaruhi strategi komunikasi yang diterapkan. Kabupaten Batubara yang memiliki karakteristik masyarakat dengan ikatan budaya yang kuat lebih efektif menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal, sedangkan Kota Banjarbaru sebagai wilayah perkotaan lebih membutuhkan strategi komunikasi yang memadukan media digital, kampanye kesehatan, dan sosialisasi langsung kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa strategi komunikasi pembangunan harus disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara optimal.

Selanjutnya, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Insyirah Salsabila Alif (2023) mengenai strategi komunikasi kesehatan dalam penanganan stunting di Kelurahan Watang

Bacukiki Kota Parepare. Penelitian Alif menemukan bahwa keberhasilan program penanganan stunting dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengatasi hambatan komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan inovasi program yang menarik bagi masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan kondisi yang relatif serupa, yaitu masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting, rendahnya cakupan ASI eksklusif, dan rendahnya kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Namun demikian, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup kajian. Penelitian Alif lebih berfokus pada strategi komunikasi kesehatan di tingkat kelurahan, sedangkan penelitian ini menganalisis komunikasi pembangunan pada tingkat pemerintah kota yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan temuan yang lebih luas terkait pentingnya koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan daerah dalam memperkuat efektivitas komunikasi pembangunan.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Tukma Harahap (2025) yang menemukan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan kader posyandu melalui kunjungan rumah dan komunikasi tatap muka memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan program penanganan stunting. Hasil penelitian di Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa kader posyandu dan kader PKK juga berperan penting sebagai agen komunikasi pembangunan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan posyandu, penyuluhan kesehatan, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada pendekatan yang digunakan. Harahap lebih menekankan komunikasi interpersonal sebagai strategi utama, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa kombinasi antara komunikasi tatap muka dan pemanfaatan media digital merupakan strategi yang lebih relevan untuk diterapkan pada masyarakat perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola komunikasi pembangunan sehingga tidak lagi hanya mengandalkan komunikasi langsung, tetapi juga memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi dan kampanye kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain memperkuat hasil penelitian terdahulu, penelitian ini juga menghasilkan temuan baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Temuan tersebut adalah pentingnya integrasi antara strategi komunikasi pembangunan dengan analisis faktor internal dan eksternal melalui pendekatan SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Pemerintah Kota Banjarbaru berada pada Kuadran I (Strategi Agresif) yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang besar dalam mempercepat penurunan stunting. Temuan ini menghasilkan rekomendasi strategis berupa optimalisasi kebijakan daerah, penguatan sinergi lintas sektor, pengembangan inovasi media komunikasi, peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan, serta optimalisasi dukungan program nasional dalam percepatan penurunan stunting. Pendekatan ini belum ditemukan secara eksplisit dalam penelitian Ramadhan (2020), Sazali (2022), Alif (2023), maupun Harahap (2025) yang lebih berfokus pada deskripsi strategi komunikasi tanpa melakukan analisis strategis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan penelitian terdahulu mengenai pentingnya komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan peran kader kesehatan dalam penanganan stunting, tetapi juga memberikan kontribusi baru melalui penggunaan teori Academy for Educational Development (AED) yang dipadukan dengan analisis SWOT. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi komunikasi pembangunan yang efektif dalam percepatan penurunan stunting di Kota

Banjarbaru serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi komunikasi pembangunan untuk penanganan stunting di Kota Banjarbaru. Faktor penghambat meliputi masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting, rendahnya cakupan ASI eksklusif, rendahnya kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), serta keterbatasan partisipasi masyarakat karena kesibukan sehari-hari sehingga tidak selalu mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi. Selain itu, penyampaian informasi yang masih bersifat teknis dan cenderung top-down menyebabkan sebagian masyarakat sulit memahami pesan yang diberikan. Sementara itu, faktor pendukung yang ditemukan adalah adanya dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah, kerja sama lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), keterlibatan aktif kader posyandu dan PKK, serta pemanfaatan berbagai media komunikasi dan kampanye kesehatan yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru telah dilaksanakan melalui strategi berbasis media, desain instruksional, partisipatori, dan pemasaran yang secara umum berjalan cukup baik dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan stunting. Pemanfaatan berbagai media komunikasi, pelaksanaan edukasi yang terstruktur, keterlibatan aktif masyarakat, serta penerapan pemasaran sosial telah mendukung upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru telah berperan dalam mendukung penanganan stunting, meskipun masih memerlukan penguatan dan optimalisasi agar hasil yang dicapai lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada strategi komunikasi pembangunan dalam penanganan stunting di Kota Banjarbaru dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terbatas pada instansi terkait serta masyarakat di wilayah prioritas stunting. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi perubahan perilaku sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor struktural penyebab stunting seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan kondisi sanitasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak informan dan pemangku kepentingan. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas media digital, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keberhasilan komunikasi pembangunan dalam percepatan penurunan stunting sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penelitian hingga penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alif, I. S., Karnay, S., & Amir, A. S. (2023). Strategi komunikasi kesehatan penanganan stunting (Studi pada kelurahan Watang Bacukiki kota Parepare). Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 12(1), 66–89. https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.66-89

Astuti, S. J. W., et al. (2025). Modeling environmental interactions and collaborative interventions for childhood stunting: A case from Indonesia. *Dialogues in Health*, 100205. https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100205

Dilla, S. (2007). Komunikasi pembangunan: Pendekatan terpadu. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Galasso, E., & Wagstaff, A. (2019). The aggregate income losses from childhood stunting and the returns to a nutrition intervention aimed at reducing stunting. Economics & Human Biology, 34, 225–238. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2019.01.010

Green, L. W. (1980). Health promotion planning: An educational and environmental approach. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company.

Harahap, T., & Wibowo, A. A. (2025). Strategi Komunikasi Kader Posyandu Dalam Penanganan Stunting Di Desa Tengklik Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora, 8(2), 105–117. https://doi.org/10.36624/jisora.v8i2.306

Harun, R., & Ardianto, E. (2011). Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.

Harun, R., & Ardianto, E. (2012). Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat: Strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal. CV. Nur Lina.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/

Kustiawan, Y. A., & Lim, T. Y. (2023). User stories in requirements elicitation: A systematic literature review. IEEE 8th International Conference On Software Engineering and Computer Systems (ICSECS), 211–216. https://doi.org/10.1109/ICSECS58457.2023.10256364

Labolo, M. (2016) . Memahami Ilmu Pemerintahan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Maharani, Y. (2013). Efektivitas multimedia pembelajaran interaktif berbasis kurikulum 2013. Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies, 3(1), 31–40. https://doi.org/10.15294/ijcets.v3i1.8683

Maryani, D. (2018). Pemberdayaan masyarakat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Notoatmodjo, S. (2014). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta.

Nurcholis, .N (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Grasindo

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development, 24*(6), 1073–1087. https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X

Pemerintah Kota Banjarbaru. (2023). *Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting*. Banjarbaru: Pemerintah Kota Banjarbaru. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/242226/perwali-kota-banjarbaru-no-1-tahun-2023

Raharjo, M. M. (2021). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gava Media.

Ramadhani, R. W. (2020). Strategi komunikasi pembangunan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan nawacita dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 18(2), 117–129. https://doi.org/10.46937/18202028913

Rangkuti, F. (2014). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, F. (2015). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation, 141*(10), 2417–2431. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021

Roberta, et al. (2025). Analysing the potential of ChatGPT to support plant disease risk forecasting systems. *Smart Agricultural Technology, 10*, 100824. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100824

Sazali, H., Mailin, M., & Harahap, N. (2022). Komunikasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study, 8(1), 26–34. https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i1.5640

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan (Edisi Ketiga). Jakarta : Alfabeta.

Sumodiningrat, G. (2009). Mewujudkan kesejahteraan bangsa: Menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Gramedia.

Usman, S. (2010). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Cetakan ke-6). Pustaka Pelajar.

Zakiah, K., & Umar, M. (2005). Komunikasi Intruksional dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa. Jakarta : Erlangga.